

PENGARUH PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP KINERJA EKONOMI DATI II DI JAWA BARAT, 1999-2003

Ima Amaliah*

Abstrak

Jawa Barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang menggunakan indeks pembangunan manusia (IPM) sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunannya. Namun demikian, pencapaian angka indeks ini masih jauh dari realisasi jika melihat visi provinsi Jawa Barat pada tahun 2010 yaitu mencapai IPM 80. Jika menelusuri teori, Pembangunan manusia memiliki peran yang cukup penting dalam menggerakkan roda perekonomian suatu wilayah. Dengan modal manusia yang berkualitas maka kinerja ekonomi di wilayah tersebut akan jauh lebih berkembang dibanding wilayah lainnya yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Hal ini terjadi karena Modal manusia merupakan motor penggerak dalam memanfaatkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Demikian pula sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat memacu pembangunan manusia yang lebih baik. Dengan kinerja ekonomi yang tinggi, maka alokasi pengeluaran pemerintah untuk sektor publik akan jauh lebih besar. Dengan demikian, modal manusia akan menjadi lebih berkualitas.

Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui pengaruh dari pembangunan manusia terhadap kinerja ekonomi Dati II di Jawa Barat selama kurun waktu 1999-2003. Pemilihan topik ini dengan alasan, jika terbukti bahwa pembangunan manusia memiliki andil yang cukup besar terhadap kinerja ekonomi, maka stimulasi kebijakan yang diambil lebih mengarah pada bagaimana menciptakan mutu modal manusia. Dalam penelitian ini digunakan data pooling yang disusun dari data basis untuk penyusunan indeks pembangunan manusia di Jawa Bara selama tahun 1999-2003.

Dari hasil estimasi model, maka diperoleh hasil bahwa pembangunan manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja ekonomi Dati II di Jawa Barat. Selain itu, pemerataan hasil pembangunan antara wilayah

* **Ima Amaliah,SE.,MSi**, adalah dosen tetap Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Unisba

memiliki pengaruh yang sangat berarti dalam mendorong pertumbuhan output regional (Jawa Barat). Dengan demikian, pemerintah daerah maupun Pemprov hendaknya memberi perhatian yang lebih besar untuk pengembangan modal manusia. Salah satunya melalui penambahan alokasi dana untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pelayanan untuk sektor besar serta penyediaan infrastruktur bagi wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh sektor swasta harus mendapat prioritas yang lebih besar.

Kata Kunci: Pembangunan Manusia, Kinerja ekonomi

1 Latar Belakang

Fenomena penduduk jika tidak ditangani secara komprehensif dapat mengganggu kinerja pembangunan manusia, khususnya di sektor pendidikan. Dengan komposisi penduduk yang relatif besar di usia muda, tentunya perlu dipersiapkan berbagai sarana penunjang pendidikan yang memadai. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat merubah mutu sumber daya manusia (modal manusia). Modal manusianya (*human capital*) itu sendiri merupakan salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Modal manusia yang berkualitas dapat meningkatkan kinerja ekonomi suatu negara.

Kinerja ekonomi yang semakin baik dan terukur akan mampu menyerap minat masyarakat untuk berinvestasi. Investasi dapat menjadi titik tolak bagi keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan di masa depan, yang pada gilirannya akan berdampak terhadap keberlanjutan pembangunan sumber daya manusia.

Di samping pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, indikator lain yang dapat mempengaruhi modal manusia adalah pendapatan perkapita, jumlah penduduk miskin dan pola distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat. Distribusi pendapatan yang timpang akan menyebabkan banyak penduduk yang tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan untuk membeli makanan, membiayai pendidikan dan kesehatan yang pada akhirnya akan memperlambat pembangunan manusia¹. Selain itu, distribusi pendapatan yang tidak merata akan menghambat kinerja ekonomi suatu wilayah.

¹ BPS. 2004. Data Basis Untuk Analisis Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Barat

Dalam laporannya, UNDP menyebutkan bahwa urutan kualitas sumber daya manusia Indonesia berada dalam posisi yang semakin menurun. Adapun keberhasilan pembangunan suatu bangsa menurut standar UNDP dinamakan *human development index* (HDI) atau indeks pembangunan manusia (IPM). Menurut *Human Development Report* (2002), Indonesia berada pada *ranking* ke-110 setelah Vietnam (109) dari sebanyak 173 negara dengan nilai HDI sebesar 0,684 (2000). Angka ini diperoleh dari indeks harapan hidup (0,69), indeks pendidikan (0,79), dan indeks GDP (0,57). Di Asia Tenggara, HDI Indonesia paling rendah, yang berarti kualitas SDM Indonesia terendah di Asia Tenggara.

Pada tahun 1999 angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan angka melek huruf sebenarnya mengalami kenaikan yang signifikan, namun komposit pendapatan perkapita menurun drastis sehingga berimbas secara serius terhadap HDI Indonesia. Berdasarkan data, ada beberapa hal penting tentang HDI di Indonesia (2001): pertama, di antara 26 provinsi di Indonesia tidak satu pun yang termasuk dalam kategori tinggi (*high category*), dengan nilai di atas 80. Sebanyak 8 provinsi termasuk ke dalam kategori *upper-medium* dengan jarak rentang 66,00-79,00. Sebanyak 18 provinsi dikategorikan ke dalam *lower-medium* (50,00-65,99).

Dalam konteks nasional *ranking* IPM Jawa Barat menurun. Namun sebenarnya nilai IPM Jawa Barat naik jika dibandingkan antara tahun 1996 hingga 1999. Angka harapan hidup naik dari 62,9 tahun (1996) menjadi 64,3 tahun (1999), angka melek huruf naik dari 89,7% (1996) menjadi 92,1% (1999), rata-rata lama sekolah naik dari 6,4 tahun (1996) menjadi 6,8 (1999), 6,9 (2000), dan 7,04 (2002). Sementara pendapatan perkapita masyarakat Jawa Barat menurun dari Rp 591,6 ribu (1996) menjadi Rp 584,2 (1999). Jika dibandingkan dengan angka nasional, hanya komposit angka harapan hidup yang berada di bawah angka nasional (66,2). Jawa Barat (1999) juga memiliki angka partisipasi sekolah yang tinggi untuk usia 7-12 tahun (95,4%), usia 13-15 tahun (72,2%), usia 16-18 tahun (45,4%) dan usia 19-24 tahun (11,4%). Rata-rata drop out usia 7-15 tahun (3,3%), usia 16-18 tahun (10,3%), dan usia 19-24 (11,3%).

Sejalan dengan membaiknya perekonomian nasional, perkembangan perekonomian Jawa Barat selama kurun waktu dua tahun terakhir terus mengalami pertumbuhan yang signifikan yaitu dari 4,53% tahun 2003 meningkat menjadi 5,08% pada tahun 2004. Membaiknya kinerja ekonomi ini sejalan dengan pencapaian indeks pembangunan manusia (IPM).

Pencapaian IPM tahun 2004 adalah sebesar 68,36 atau meningkat 0,49 poin dibanding tahun 2003. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya indeks kesehatan 0,66 poin, indeks pendidikan 0,62 poin dan indeks daya beli 0,20 poin².

Jika ditelusuri lebih lanjut, visi Jawa Barat dinyatakan dengan ukuran IPM sebesar 80 pada tahun 2010. Namun dalam kenyataannya angka ini masih jauh dalam realisasinya. Target IPM Jawa Barat pada tahun 2003 sebesar 72,37, terealisasi sebesar 67,87 atau kurang 4,5 poin. Sedangkan pada tahun 2004 target sebesar 73,5, terealisasi sebesar 68,36 atau kurang 5,14 poin. Selama kurun waktu 2003-2004 realisasi IPM Jawa Barat hanya meningkat 0,49 poin. Angka IPM ini merupakan akumulasi dari keberhasilan seluruh kabupaten / kota di Jawa Barat.

Tabel 1. Perkembangan IPM dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Jawa Barat, 2002-2004

No	Variabel	2002	2003	2004
1	IPM:	67.45	67.87	68.36
	a. Angka harapan Hidup	64.93	64.94	65.34
	b. Angka Melek Huruf	93.10	93.60	93.96
	c. Rata-rata Lama Sekolah	7.04	7.20	7.37
	d. PPP	551.35	553.70	554.57
2	LPE (%)	4.46	4.53	5.08

Sumber: data diolah dari data basis untuk analisis IPM tahun 2003 dan 2004

Permasalahan yang dihadapi Jawa Barat sebenarnya hampir sama dengan propinsi lainnya di Indonesia, yaitu relatif lambatnya perkembangan IPM dari tahun ke tahun. Lambatnya perkembangan IPM ini tentunya disebabkan oleh banyak faktor diantaranya masih kecilnya porsi pengeluaran pemerintah untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Alokasi pengeluaran pemerintah untuk bidang sosial selama ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan Malaysia, Thailand ataupun Filipina (Indonesia Human Development Report, 2004). Ketimpangan distribusi pendapatan

² H. S. Soemirat. 2005. *Evaluasi Pencapaian Target-Target Pembangunan dan Prospeknya di Tahun 2006*, Kantor Bank Indonesia, Bandung

serta krisis ekonomi yang masih berlangsung sampai saat ini juga kenaikan bahan bakar minyak (BBM) memberikan kontribusi yang cukup besar atas perlambatan dalam pencapaian indeks pembangunan manusia dan kinerja ekonomi secara keseluruhan.

1.1 Perumusan Masalah

Permasalahan yang akan diamati dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pembangunan manusia, distribusi pendapatan dan status wilayah Dati II terhadap kinerja ekonomi Jawa Barat ?

1.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dipetik dari penelitian ini adalah:

- a. Memperkaya referensi tentang studi-studi regional khususnya mengenai pembangunan manusia dengan kinerja ekonomi pada tingkat Dati II di Jawa Barat
- b. Memberikan masukan lain kepada pemerintah akan pentingnya upaya pembangunan manusia bersama-sama dengan pembangunan ekonomi di Jawa Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya

2 Tinjauan Pustaka

Sebagian besar ekonom sepakat bahwa sumber daya manusia (*human resources*) dari suatu bangsa merupakan faktor yang paling menentukan karakter dan kecepatan pembangunan sosial dan ekonomi bangsa yang bersangkutan. Menurut Profesor Frederick Harbison dari Princenton University sebagai berikut³:

sumber daya manusia merupakan modal dasar dari kekayaan suatu bangsa. Modal fisik dan sumber daya alam hanyalah faktor produksi yang pada dasarnya bersifat pasif; manusia adalah yang merupakan agen-agen aktif yang akan mengumpulkan modal, mengeksploitasikan sumber-sumber daya alam, membangun berbagai macam organisasi sosial, ekonomi dan politik, serta melaksanakan

³ Michael P. Todaro. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Ketujuh. Dialihbahasakan oleh Drs. Haris Munandar, M.A. Erlangga. Jakarta

pembangunan nasional. Jelaslah, bahwa jika suatu negara tidak segera mengembangkan keahlian dan pengetahuan rakyatnya dan tidak memanfaatkan potensi mereka secara efektif dalam pembangunan dan pengelolaan ekonomi nasional, maka untuk selanjutnya negara tersebut tidak akan dapat mengembangkan apa pun.

Di banyak negara berkembang, pendidikan formal adalah industri dan konsumen terbesar anggaran pemerintah. Bangsa-bangsa miskin telah menginvestasikan sejumlah uang dalam jumlah besar untuk bidang pendidikan. Alasannya bermacam-macam, salah satunya agar lebih produktif dalam menerima inovasi dan teknologi baru (karena melek huruf). Kemampuan baca tulis (*literacy*) dan menyerap informasi merupakan komponen dasar dalam pengembangan sumber daya manusia.

Dalam waktu yang bersamaan, bidang pendidikan dapat pula mempengaruhi bentuk dan arah pembangunan suatu masyarakat di masa mendatang melalui berbagai jalan. Jadi hubungan antara pendidikan dan pembangunan adalah suatu proses dua arah. Sistem pendidikan akan cenderung meneruskan, memperkuat dan menghasilkan kembali struktur ekonomi dan sosial yang sama. Sebaliknya penataan kembali sistem pendidikan secara cermat, baik itu dilakukan dari dalam ataupun dari luar sistemnya itu sendiri, mempunyai potensi yang sangat besar bagi terciptanya perbaikan-perbaikan pada struktur sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Dari beberapa studi di negara-negara barat memperlihatkan bahwa bukan pengembangan modal fisik yang telah memacu pertumbuhan ekonomi, melainkan pengembangan sumber daya manusia yang merupakan motor penggerak kemajuan ekonomi di negara-negara maju. Perluasan kesempatan bersekolah telah mendorong pertumbuhan ekonomi secara agresif melalui:

- a. Terciptanya angkatan kerja yang lebih produktif kerana memiliki bekal pengetahuan dan ketrampilan yang lebih baik
- b. Tersedianya kesempatan kerja yang lebih luas untuk memperoleh pendapatan
- c. Terciptanya suatu kelompok pemimpin yang terdidik untuk mengisi lowongan jabatan di unit usaha, lembaga, perusahaan dan organisasi milik pemerintah dan swasta

d. Tersedianya berbagai program pendidikan dan pelatihan.

Tingkat pembangunan manusia (modal manusia) yang tinggi akan mempengaruhi perekonomian melalui peningkatan kapabilitas maupun produktivitas serta kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baik dalam kaitannya dengan teknologi sampai kelembagaan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan pendidikan yang baik, pemanfaatan teknologi ataupun inovasi teknologi menjadi mungkin untuk terjadi.

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah investasi dan juga distribusi pendapatan. Dengan distribusi pendapatan yang merata akan membuka kemungkinan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal ini terjadi karena dengan meratanya distribusi pendapatan maka tingkat kesehatan dan tingkat pendidikan akan lebih baik yang pada gilirannya akan memperbaiki tingkat produktivitas dan pendapatan riil penduduk. Adanya peningkatan dalam pendapatan riil akan mempunyai banyak efek baik pada naiknya permintaan barang dan jasa yang akan berujung pada tumbuhnya perekonomian. Selain itu pula, dapat meningkatkan sisi penerimaan pemerintah yang berasal dari pajak. Adanya penerimaan ini akan memberikan efek lebih lanjut pada kemampuan pemerintah untuk melakukan eksplorasi sumber-sumber daya dan investasi.

Dari hasil penelitian Akita dan Alisjahbana (2002), menunjukkan bahwa pada saat krisis ekonomi, Jawa dan Bali merupakan dua wilayah yang paling merosot perekonomiannya. Sementara itu, Irian Jaya dan Maluku justru merupakan wilayah yang paling rendah kemerosotan indeks pembangunan manusianya.⁴ Meskipun indeks pembangunan manusia kedua wilayah tersebut tetap lebih rendah dibanding propinsi-propinsi lainnya dan juga pendapatan perkapitanya, namun hal ini masih menyisakan pertanyaan. Apakah daerah yang memiliki sumber daya manusia lebih berkualitas akan lebih mampu bertahan dari krisis ekonomi misalnya dilihat dari kemerosotan pendapatan perkapitanya?. Sebaliknya, apakah daerah yang pendapatan perkapitanya sudah lebih tinggi lebih bisa terus mendukung pembangunan manusia di daerahnya?

⁴ BPS-Bappenas-UNDP, 2001 dalam Aloysius Gunadi Brata. 2004. *Analisis hubungan Imbal Balik antara Pembangunan Manusia dan Kinerja Ekonomi di Indonesia*.

Dari beberapa hasil studi empiris baik yang dilakukan oleh Garcia dan Soelistianingsih (1998) maupun Wibisono menyimpulkan bahwa modal manusia (*human capital*) dalam bentuk pendidikan maupun kesehatan mempunyai kontribusi penting dalam pertumbuhan ekonomi serta dalam mempercepat proses pemerataan pendapatan antar daerah.

Secara global pendekatan paradigma pembangunan di dunia, termasuk Indonesia, telah mengalami berbagai perkembangan. Pada tahun 60-an paradigma pembangunan diorientasikan pada produksi (*production centered development*). Paradigma ini berganti menjadi pendekatan yang menekankan distribusi pada hasil-hasil pembangunan (*distribution growth development*) pada tahun 70-an. Berikutnya pada tahun 80-an muncul paradigma baru yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia (*basic need development*). Pada dekade 90-an berkembang paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia (*human centered development*).

UNDP (1990) dalam laporan pertamanya menulis, *People are the real wealth of a nation. The basic objective of development is to create an enabling environment for people to enjoy long, healthy, and creative lives. But it is often forgotten in the immediate concern with the accumulation of commodities and financial wealth.* Negara-negara maju telah menjadikan sumber daya manusia (SDM) sebagai kekuatan terbesar dalam membangun bangsanya. Singapura adalah salah satu contoh negara makmur yang tidak memiliki sumber daya alam berlimpah, namun memiliki SDM yang handal. Fenomena ekonomi dan SDM Indonesia hingga kini tidak lain adalah realitas ketertinggalan kualitas SDM sekalipun sumber alam melimpah ruah yang secara politis-ekonomis hingga kini, belum memberikan kemakmuran bagi rakyat Indonesia.

Pembangunan manusia disandarkan pada prinsip-prinsip *productivity, equity, sustainability, dan empowerment* (HDR, 1995:12). Maknanya, masyarakat harus produktif dan partisipatif secara penuh dalam menciptakan generasi dan kesempatan bekerja; masyarakat harus mendapatkan akses dan kesempatan yang sama dalam berekonomi dan berpolitik; kesempatan harus berlangsung secara berkelanjutan, bukan hanya pada satu generasi saja; dan pembangunan diperuntukkan bagi rakyat banyak, bukan untuk segelintir orang. Dengan demikian, masyarakat harus ikut dalam memutuskan dan proses berlangsungnya pembangunan.

Indeks pembangunan manusia (IPM) terdiri atas tiga komposit, yakni indeks harapan hidup (*life expectancy index*) atau indeks kesehatan, indeks

pendidikan (*education index*), dan indeks daya beli (*GDP index*). Komposit indeks pendidikan terdiri atas indeks rata-rata lama sekolah (RLS) dan melek huruf (*adult literacy rate*). Rata-rata lama sekolah dihitung melalui komponen partisipasi sekolah, tingkat (kelas) yang sedang (pernah) dijalani, dan jenjang pendidikan tinggi yang ditamatkan. Indikator melek huruf adalah kemampuan baca-tulis huruf latin usia 15 tahun ke atas. Berdasarkan indikator indikator ini akan lahir indeks pendidikan yang menjadi penentu posisi kemajuan pendidikan suatu bangsa. Dalam indeks melek huruf ini penduduk Indonesia diklasifikasi menjadi literat dan illiterat.

Dalam mewujudkan pendidikan yang berbasis IPM, terutama di Jawa Barat, diperlukan langkah-langkah: pertama, sosialisasi konsep IPM kepada seluruh distrik (kota/kabupaten) untuk mendapatkan pemahaman yang sama agar dalam praktik pembangunan pendidikan dapat berjalan secara bersinergi. Kedua, harus ditentukan masing-masing komposit pada setiap kota/kabupaten dengan melihat struktur perkembangannya agar setiap daerah memiliki *judgement* yang tepat. Ketiga, harus ditentukan indikator-indikator langsung maupun tidak langsung pada setiap kota/ kabupaten yang berpengaruh terhadap pendidikan. Dari sini lahir prioritas program. Keempat, dilakukan evaluasi program pembangunan pendidikan agar sesuai dengan indikator-indikator yang sudah ditentukan. Program pendidikan kerap kali tidak didasari oleh rasionalisasi paradigma pendidikan yang jelas, bahkan hanya didasarkan pada rutinitas program dari tahun ke tahun. Program pendidikan jangan bersifat temporer atau hanya merespons isu-isu yang berkembang, tanpa didasari oleh akar landasan yang kuat.⁵

Begitu pula halnya dengan indeks kesehatan yang dipengaruhi oleh angka kematian bayi dan angka kematian ibu, lebih banyak bertumpu di pemerintah kabupaten/kota, karena berkaitan dengan pelayanan langsung terhadap masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan. Intervensi yang dapat dilakukan pemerintah provinsi terbatas pada penyediaan sarana/prasarana, dan sebagainya pada aspek kesehatan lingkungan.

Sementara pada indeks daya beli sangat ditentukan oleh tingkat pendapatan masyarakat yang berkait erat dengan pelaku usaha dan tingkat inflasi. Pemerintah provinsi hanya berperan dalam menentukan tingkat upah minimum dan upaya promosi untuk menarik investor.

⁵ Dadang S. Anshori. 2006. *Raksa Desa, Pendidikan, Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*

3 Metode Penelitian

3.1 Model Estimasi

$$Y = a_0 + a_1AAH + a_3GR + a_4DCITY + U$$

Dimana:

Y : Output Regional

AAH : Angka Harapan Hidup

GR : Gini Rasio

DCITY : Variabel Boneka untuk membedakan status wilayah kabupaten atau kota di Jawa Barat

U : disturben (faktor gangguan)

3.2 Data

Dari model yang digunakan di atas maka operasionalisasi variabelnya adalah sebagai berikut:

- a. Output regional dalam penelitian ini diproksi dari pengeluaran perkapita riil. Pemilihan data ini dengan pertimbangan lebih dekat dengan konsep kesejahteraan. Selain itu untuk mengantisipasi keterbatasan data output regional yang disebabkan adanya pemekaran wilayah di Jawa Barat.
- b. Indikator pembangunan manusia yang digunakan dalam penelitian ini adalah angka harapan hidup (*life expectation*), di mana angka harapan hidup merupakan salah satu komponen dari IPM. Alasan tidak digunakannya IPM dalam penelitian ini adalah untuk menghindari munculnya persoalan kolinieritas yang disebabkan penggunaan pengeluaran perkapita sebagai proksi output regional.
- c. Distribusi pendapatan yang digunakan dalam penelitian ini diproksi dari indeks gini kabupaten dan kota di Jawa Barat
- d. Variabel boneka (*dummy variable*) status kota dan kabupaten di Jawa Barat. Hal ini dengan pertimbangan bahwa wilayah kota pada umumnya lebih unggul dibandingkan wilayah kabupaten baik dalam hal pertumbuhan maupun pembangunan manusia.

3.3 Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan model regresi panel data. Panel Data merupakan penggabungan data *time series* dengan data *cross section*. Hal ini dilakukan karena adanya keterbatasan data. Panel data merupakan sekumpulan data yang disusun berdasarkan sampel individual sepanjang waktu tertentu dan kemudian ditunjukkan untuk multi observasi bagi individu yang ada dalam sampel tersebut atau data silang. Ciri khusus dari data runtun waktu adalah berupa urutan numerik di mana interval antar observasi atas sejumlah variabel. Bila sejumlah variabel untuk sejumlah silang tempat yang berbeda diobservasi selama kurun waktu tertentu, maka disebut *pooling* atau panel data.⁶

Penggunaan panel data dalam penelitian ekonomi mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan dengan data runtun waktu atau data silang tempat biasa. Pertama, dapat memberikan peneliti sejumlah data yang besar, sehingga menaikkan *degree of freedom* (df) dan mengurangi kolineritas diantara variabel penjelas, sehingga akan menghasilkan estimasi ekonometrik yang efisien. Kedua, mampu menangkap atau mengestimasi keberagaman secara eksplisit dari setiap unit individu.

4 Pembahasan

Hasil estimasi model dengan menggunakan panel data dengan series tahun 1999–2003 dan *cross unit* seluruh kabupaten dan kota yang ada di Jawa Barat maka dapat dilihat dalam tabel 2. Untuk validitas model maka dilakukan uji outokorelasi untuk melihat ada / tidaknya hubungan antar residual pada suatu pengamatan dengan pengamatan lain. Pengujian outokorelasi ini menggunakan *Durbin Watson test* (DW-test). Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa estimasi model dalam penelitian ini bebas dari masalah outokorelasi.

Selain itu, jika ditelusuri lebih jauh dengan menggunakan uji t statistik, hasil estimasi model menunjukkan bahwa semua variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen pada tingkat keyakinan yang ditetapkan. Artinya pembangunan manusia, distribusi pendapatan dan status wilayah Dati II secara parsial mempengaruhi kinerja ekonomi wilayah Dati

⁶ Damodar N. Gujarati. 1995. *Basic Econometrics*. Third Edition. McGraww-HILL International Edition.

II di Jawa Barat. Hal ini terlihat dari nilai t statistik yang berada di daerah penolakan pada tingkat kepercayaan yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu antara 1% sampai 25%.

Nilai koefisien determinan (*R square*) dari model yang telah diestimasi sebesar 0.9068. Artinya bahwa variasi dari pembangunan manusia, distribusi pendapatan dan status wilayah kota dan kabupaten di Jawa Barat mampu menjelaskan kinerja ekonominya sebesar 90.68% sedangkan sisanya karena variasi dari variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini (diasumsikan konstan).

**Tabel 2. Hasil Estimasi Model
Pengaruh Pembangunan Manusia Terhadap Kinerja Ekonomi
Di Jawa Barat, 1999-2003**

Dependent Variable: Y?
Method: Pooled Least Squares
Date: 01/01/97 Time: 00:34
Sample: 1999 2003
Included observations: 5
Total panel observations 104

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
AHH?	2513.051	1206.158	2.083518	0.0393
GR?	-555859.1	53934.57	-10.30618	0.0000
DCITY?	-1312.913	841.5821	-1.560053	0.1213
Fixed Effects				
_01--C	92392.18			
_02--C	77609.83			
_03--C	60094.77			
_04--C	96660.08			
_05--C	95015.42			
_06--C	86229.18			
_07--C	82783.24			
_08--C	68786.15			
_09--C	73345.45			
_10--C	82981.41			
_11--C	85770.30			
_12--C	75561.42			
_13--C	54898.70			
_14--C	79245.98			

_15--C	84871.84		
_16--C	83272.82		
_17--C	107135.0		
_18--C	88120.51		
_19--C	134144.4		
_20--C	116355.7		
_21--C	131637.5		
R-squared	0.906869	Mean dependent var	61404.74
Adjusted R-squared	0.880093	S.D. dependent var	32241.65
S.E. of regression	11164.49	Sum squared resid	9.97E+09
F-statistic	389.5005	Durbin-Watson stat	1.746369
Prob(F-statistic)	0.000000		

4.1 Pengaruh Pembangunan Manusia Terhadap Kinerja Ekonomi Jawa Barat

Jika ditelusuri lebih lanjut pengaruh masing-masing variabel maka terlihat bahwa secara statistik variabel pembangunan manusia sangat mempengaruhi kinerja ekonomi Jawa Barat selama kurun waktu penelitian. Angka harapan hidup seluruh kota dan kabupaten (sebagai salah satu indikator IPM yang digunakan dalam penelitian ini) memberikan pengaruh positif terhadap kinerja ekonomi Jawa Barat. Artinya ketika kualitas pembangunan manusia baik maka kinerja ekonomi wilayah ini pun akan meningkat. Hal ini sejalan dengan teori bahwa modal manusia merupakan motor penggerak tumbuhnya perekonomian suatu wilayah. Ketika suatu wilayah memiliki sumber daya manusia berkualitas maka wilayah ini akan jauh lebih berkembang dibanding wilayah lainnya. Ini terjadi karena penduduk di wilayah tersebut akan lebih mudah dalam mengadopsi berbagai informasi maupun teknologi yang ada. Penduduk di wilayah ini akan menjadi lebih produktif dalam mengelola sumber-sumber potensial yang dapat mendorong pertumbuhan wilayahnya. Kasus yang sangat nyata, meskipun Singapura tidak memiliki sumber alam yang berlimpah, namun memiliki modal manusia yang unggul, kinerja ekonomi Singapura jauh lebih tinggi dibanding negara-negara lainnya di kawasan Asia.

Tingginya produktivitas ini tentunya akan berkorelasi positif dengan pendapatan perkapita penduduk. Naiknya pendapatan perkapita akan mendorong alokasi dana untuk pendidikan dan kesehatan menjadi lebih

besar. Dengan demikian, penduduk menjadi lebih pintar (melek huruf) dan angka harapan hidup pun menjadi lebih panjang.

Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa semakin makmur perekonomian suatu negara maka alokasi pengeluaran rumah tangga untuk non makanan (kesehatan, pendidikan, rekreasi dan lain-lain) porsinya akan lebih besar dibanding negara yang perekonomiannya rendah⁷. Di negara berkembang, Lebih dari 50 persen pengeluaran rumah tangga dialokasikan untuk makanan (kebutuhan pokok). Dengan demikian pembangunan manusia di negara kaya akan jauh lebih tinggi dibanding negara miskin.

Dari data publikasi BPS diperoleh informasi perkembangan angka harapan hidup (AHH) di seluruh Dati II Jawa Barat menunjukkan perkembangan yang positif dari tahun 1999 sampai 2003. Antara tahun 2002-2003, sebagian besar wilayah Dati II di Jawa Barat memiliki AHH antara 65 sampai 69. Namun demikian, ada beberapa Dati II memiliki angka AHH yang sangat ekstrim (relatif tinggi dan rendah) dibanding wilayah Dati II lainnya di Jawa Barat. Adapun informasi lebih lengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

⁷ Soeharsono Sagir. 1992. Analisis Indikator Sosial Ekonomi di Indonesia. Makalah.

Tabel 3. Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Tertinggi dan Terendah Dibeberapa Wilayah Dati II Di Jawa Barat, 2002-2003

Kab/Kota	AHH Tertinggi		Kab/Kota	AHH Terendah	
	2002	2003		2002	2003
Kota Sukabumi	71.03	71.24	Kab. Garut	61.47	61.5
Kota Bandung	71.05	71.3	Kab. Cianjur	63.7	64.6
Kota Bekasi	69.55	70.2	Kab. Cirebon	65.95	63.5

Sumber: diolah dari Data Basis Untuk Penyusunan IPM di Jawa Barat, 2002-2003, BPS

Dari tabel di atas terlihat bahwa AHH di Kota Bandung, Kota Sukabumi dan Kota Bekasi menunjukkan angka yang sangat baik. Pencapaian ini hendaknya dipertahankan bahkan ditingkatkan di masa datang. Sementara di sisi lain angka AHH Kabupaten Garut paling rendah dibanding kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat. Pemerintah Jawa Barat hendaknya memberikan perhatian lebih banyak berupa penambahan alokasi dana sosial baik untuk kesehatan maupun pendidikan. Dengan demikian, Kabupaten Garut diharapkan dapat mengejar ketertinggalan dalam pengembangan sumber daya manusia yang merupakan mesin penggerak pertumbuhan ekonomi di wilayah ini. Begitu pun dengan Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Cirebon harus mendapat perhatian lebih banyak dari pemerintah Jawa Barat. Seperti diketahui Kabupaten Garut, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Cianjur merupakan wilayah yang sangat potensial baik dilihat dari sumber daya alamnya maupun letak geografisnya. Dengan demikian, pengembangan modal manusia dan penyediaan infrastruktur yang memadai perlu mendapat prioritas baik dari pemerintah setempat maupun pemerintah provinsi.

Perkembangan AHH di atas ternyata sejalan dengan perkembangan pengeluaran perkapita untuk sektor non makanan di wilayah Dati II di Jawa Barat. Jika pada tahun 1999-2001 perkembangan pengeluaran rumah tangga untuk sektor non makanan berada pada interval 23.687 rupiah (1999) sampai 106.999 rupiah (2000). Namun pada tahun 2001 – 2003, alokasi pengeluaran rumah tangga untuk non makanan menunjukkan peningkatan yang cukup berarti yaitu antara rentang 42.579 rupiah (2001) hingga 190.025 rupiah

(2003). Adapun perkembangan pengeluaran perkapita untuk sektor non makanan di beberapa wilayah yang memiliki AHH tertinggi dan terendah sebagai berikut:

Tabel 4. Perkembangan Pengeluaran Perkapita Sektor Non Makanan Dibeberapa Wilayah Dati II yang Memiliki AHH Tertinggi dan Terendah, Tahun 2002-2003

Kab/Kota	Y/ kapita Tertinggi (Rp)		Kab/Kota	Y/kapita Terendah (Rp)	
	2002	2003		2002	2003
Kota Sukabumi	84.242	90.983	Kab. Garut	47.179	49.448
Kota Bandung	161.093	155.632	Kab. Cianjur	44.157	53.857
Kota Bekasi	144.806	190.025	Kab. Cirebon	42.579	52.623

Sumber: Diolah dari data basis untuk penyusunan IPM di Jawa Barat, 2002-2003, BPS

Catatan Y/ kapita : Pengeluaran perkapita untuk sektor non makanan.

Melihat perkembangan data di atas terlihat jelas bahwa ketika wilayah Dati II memiliki kualitas sumber daya lebih baik, maka kinerja ekonomi di wilayah ini pun menunjukkan angka yang cukup baik. Hal ini mengilustrasikan bahwa pengembangan sumber daya manusia penting untuk dilakukan dalam rangka mendorong perokonomian daerah. Perkembangan kinerja ekonomi Dati II ini akan berimbas positif pada kinerja ekonomi Jawa Barat secara keseluruhan.

4.2 Pengaruh Distribusi Pendapatan Terhadap Kinerja Ekonomi Jawa Barat

Dari hasil estimasi model, distribusi pendapatan yang diproksi dari indeks gini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja ekonomi Dati II di Jawa Barat. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin merata distribusi pendapatan antar Dati II maka akan semakin baik kinerja ekonomi

Jawa Barat. Dari hasil pengamatan data yang dipublikasikan oleh BPS pada tahun 1999 sampai 2001 terlihat bahwa indeks gini dari seluruh Dati II di Jawa Barat berada pada kisaran angka 0.150 sampai 0.265. Pada tahun 2002-2003 angka ini menunjukkan perbaikan yaitu antara 0.110 sampai 0.218. Semakin kecilnya angka indeks gini mengindikasikan kinerja ekonomi yang dicapai selama ini dapat dinikmati seluruh masyarakat yang ada di wilayah ini. Secara teori, ketika nilai indeks gini mendekati 0, maka artinya kesenjangan distribusi pendapatan semakin kecil (distribusi pendapatan semakin merata). Sebaliknya semakin besar nilai indeks gini (mendekati nilai 1) maka distribusi pendapatan semakin tidak merata (kesenjangan tinggi).

Jika dilihat dari garis kemiskinan menurut kabupaten / kota di Jawa Barat, persentase perubahan penduduk miskin dari tahun 1996-1999 sebesar 111,84%. Daerah yang paling banyak memiliki penduduk miskin adalah Kota Bogor (588,22%), Kabupaten Cirebon (549,77%), disusul Kabupaten Tasikmalaya (253,23%). Sedangkan daerah yang tingkat kemiskinannya rendah adalah Kabupaten Karawang (-0,44), disusul Kabupaten Purwakarta (24,81%) dan Kabupaten Subang (24,96%).⁸

Angka ini menunjukkan perbaikan pada tahun 2000-2002, di mana persentase perubahan penduduk miskin di Jawa Barat sebesar 24,74% (turun dibandingkan periode sebelumnya). Kota Bogor, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Tasikmalaya hanya menyumbang kemiskinan pada Provinsi Jawa Barat masing-masing sebesar 35,60%, 18,54 dan 15,64%. Ketiga daerah ini mengalami perbaikan yang sangat berarti dalam pengurangan angka kemiskinan. Hal ini sejalan dengan perkembangan angka indeks gini yang dicapai daerah ini. Pada tahun 1999, indeks gini untuk Kota Bogor sebesar 0.229, Kabupaten Cirebon 0.222 dan Kabupaten Tasikmalaya sebesar 0.230. Angka ini mengalami perbaikan pada tahun 2000 di mana indeks gini untuk Kota Bogor menurun menjadi 0.191, Kabupaten Cirebon turun menjadi 0.193. Pada tahun 2002, indeks gini dari Kota Bogor sebesar 0.123, Kabupaten Cirebon sebesar 0.197 dan Kabupaten Tasikmalaya sebesar 0.218 semakin mendekati nilai nol. Dari fenomena ini tergambar jelas bahwa ketika ketimpangan distribusi pendapatan tinggi maka tingkat kemiskinan pun semakin besar. Semakin merata distribusi pendapatan antar wilayah ini akan memberikan efek yang lebih positif pada pertumbuhan ekonomi regionalnya (Jawa Barat).

⁸ BPS. 1999. *Data Basis untuk Analisis Indeks Pembangunan Manusia Jawa Barat*.

4.3 Pengaruh Status Wilayah Terhadap Kinerja Ekonomi di Jawa Barat

Dari hasil estimasi dalam tabel 2 variabel status wilayah Dati II di Jawa Barat menunjukkan hasil yang signifikan. Artinya status wilayah Dati II memiliki pengaruh yang cukup berarti bagi kinerja ekonomi wilayah bersangkutan. Wilayah kota biasanya memiliki keunggulan dibanding wilayah kabupaten baik dalam hal pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan manusianya.

Dari hasil pengamatan data yang dipublikasikan BPS tergambar jelas bahwa pada tahun 1999, wilayah kota pada umumnya memiliki ranking pencapaian IPM yang sangat baik (yaitu antara ranking 1 sampai 4) kecuali Kota Bekasi berada pada ranking 8. Jika dilihat dari indikator IPM, maka AHH untuk wilayah Kota ini berada pada angka 97 kecuali untuk Kota Cirebon AHH-nya hanya sebesar 94.6.

Begitu pula jika dilihat dari kinerja ekonomi yang tercermin dalam laju pertumbuhan ekonomi, wilayah kota memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Hal ini dimungkinkan karena wilayah kota memiliki potensi yang cukup baik dilihat dari potensi daerah maupun sumber daya manusianya. Dengan demikian roda perekonomian akan bergerak lebih cepat dibanding wilayah kabupaten. Gambaran IPM dan Kinerja Ekonomi wilayah kota dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 5. Perkembangan Indikator Pembangunan Manusia Dan Kinerja Ekonomi Beberapa Wilayah Kota Di Jawa Barat, Tahun 1999 dan 2002

Wilayah Kota	Tahun 1999		Tahun 2002		LPE (%)	
	AHH	AMH	AHH	AMH	1999	2002
Bogor	67.7	97.4	71.13	97.66	3.28	4.73
Sukabumi	65.7	97.6	71.05	98.80	3.20	4.82
Bandung	68.2	98.3	71.05	98.98	2.80	5.41
Cirebon	67.1	94.6	68.5	95.83	2.29	2.39
Bekasi	66.6	97.1	69.55	98.23	2.63	7.52

Sumber: diolah dari data basis untuk penyusunan IPM Jawa Barat, 1999 dan 2002

Namun demikian, tidak berarti semua wilayah kabupaten tidak potensial dalam pembangunan manusia dan kinerja ekonominya. Hal ini terbukti ada beberapa wilayah kabupaten memiliki kualitas pembangunan manusia baik dengan kinerja ekonominya tinggi. Adapun daerah yang dimaksudkan adalah Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Kuningan. Semua wilayah kabupaten ini berada pada peringkat 5 sampai 10.

Tabel 6. Peringkat Indeks Pembangunan Manusia Dibeberapa Wilayah Kota dan Kabupaten di Jawa Barat, 1999

No	Kota/ Kabupaten	Rangking
1	Kota Bandung	1
2	Kota Bogor	2
3	Kota Sukabumi	3
4	Kota Cirebon	4
5	Kab. Sumedang	5
6	Kab. Bandung	6
7	Kab. Bogor	7
8	Kota Bekasi	8
9	Kab. Tasikmalaya	9
10	Kab. Kuningan	10

Sumber: diolah dari data basis untuk penyusunan IPM di Jawa Barat, 1999

5 Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

5.1 Kesimpulan

Dari hasil estimasi model yang dikembangkan dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa pembangunan manusia, distribusi pendapatan dan status wilayah Dati II secara parsial sangat berpengaruh terhadap kinerja ekonomi Dati II di Jawa Barat. Hal ini ditunjukkan oleh signifikannya nilai t statistik pada tingkat kepercayaan yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan, bahwa peningkatan kualitas modal manusia pada wilayah Dati II akan memberikan efek yang lebih besar pada kinerja ekonomi Jawa Barat secara keseluruhan. Dengan demikian, pembangunan seyogyanya tidak

hanya menekankan pada kinerja ekonomi semata, tetapi sekaligus juga pada pembangunan manusianya. Efek lanjutan dari kondisi ini akan mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah.

5.2 Rekomendasi Kebijakan

Bertolak dari penemuan dalam penelitian ini maka dapat diambil beberapa rekomendasi kebijakan diantaranya:

- a. Pemerintah pusat dan daerah hendaknya memberikan perhatian yang lebih besar pada pengembangan mutu modal manusia melalui penambahan proporsi alokasi anggaran untuk pendanaan sektor publik serta memberikan perhatian yang lebih besar pada pelayanan dasar dibidang kesehatan, pendidikan serta infrastuktur daerah tertinggal yang kurang tersentuh dunia usaha.
- b. Perguruan tinggi hendaknya mengambil peran lebih besar untuk memfasilitasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan pengembangan sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aloysius Gunadi Brata. 2004. Hubungan Imbal Balik antara Pembangunan Manusia dengan Kinerja Ekonomi di Indonesia. *Jurnal*. Universitas Atmajaya. Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik (BPS). 1999. *Data Basis untuk Analisis Indeks Pembangunan Manusia Propinsi Jawa Barat*. BPS. Jawa Barat
- , 2000. *Data Basis untuk Analisis Indeks Pembangunan Manusia Propinsi Jawa Barat*. BPS. Jawa Barat
- , 2001. *Data Basis untuk Analisis Indeks Pembangunan Manusia Propinsi Jawa Barat*. BPS. Jawa Barat
- , 2002. *Data Basis untuk Analisis Indeks Pembangunan Manusia Propinsi Jawa Barat*. BPS. Jawa Barat
- , 2003. *Data Basis untuk Analisis Indeks Pembangunan Manusia Propinsi Jawa Barat*. BPS. Jawa Barat
- , 2004. *Data Basis untuk Analisis Indeks Pembangunan Manusia Propinsi Jawa Barat*. BPS. Jawa Barat
- , 2004. *Penyusunan Data Sosial Ekonomi Daerah (SUSEDA) Propinsi Jawa Barat*. BPS. Jawa Barat
- , 2005. *Penyusunan Data Sosial Ekonomi Daerah (SUSEDA) Propinsi Jawa Barat*. BPS. Jawa Barat
- Dadang S. Anshori. 2006. Raksa Desa, Pendidikan, Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). *Makalah*
- Gujarati. Damodar N. 1995. *Basic Econometrics*. Third Edition. McGraw-HILL International Edition
- Todaro P. Michael. 2000. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*. Edisi Ketujuh. Alih Bahasa. Erlangga. Jakarta
- Soeharsono Sagir. 1992. Analisis Indikator Sosial Ekonomi Indonesia. *Makalah*
- Soemirat. 2005. Evaluasi Pecapaian Target-target Pembangunan dan Prospeknya di Tahun 2006. *Makalah*. Kantar Bank Indonesia. Bandung